
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN
KERJA PADA PT. SASA INTI Tbk CABANG PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 5 AYAT 3)****APRIYADI**Nim : 21.11.036 ; Program Studi : Administrasi Publik

ABSTRACT

Apriyadi, 2025. *Implementation of Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Occupational Safety and Health in the Work Environment at PT. Sasa Inti Tbk, Palembang Branch (Case Study of Article 5 Paragraph 3) Department of Public Administration, Satya Negara State Administrative College (STIA). Main Supervisor (I) Ms. Rahmawati, S.H., M.Sc. and Assistant Supervisor (II) Mr. Ahmad Yani Kosali, SH., SE., MM.*

This study aims to determine and analyze the implementation of Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Occupational Safety and Health in the Work Environment at PT. Sasa Inti Tbk, Palembang Branch, specifically Article 5 Paragraph 3, which covers workplace buildings, cleaning facilities, air requirements, and housekeeping procedures. The background of this research is based on the importance of implementing hygiene and sanitation in creating a healthy and safe work environment, considering that there are still indications of problems related to human resources and the completeness of cleaning facilities in the company.

The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The informants consisted of management directly involved in warehouse operations and the management of PT. Sasa Inti Tbk's Palembang Branch. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.

The results showed that the regulation had been implemented through policy socialization, provision of hygiene facilities, and regulation of housekeeping procedures. However, limitations remained in the completeness of facilities, air requirements in the warehouse area, and the number and competence of human resources. In conclusion, although implementation has been ongoing, improvements to infrastructure, workforce training, and regular monitoring are needed to ensure compliance with applicable hygiene and sanitation standards.

Keywords: Policy Implementation, Occupational Safety and Health.

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Kesehatan kerja merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang memfokuskan perhatian pada masyarakat pekerja baik yang berada disektor formal maupun yang berada di sektor informal (Depkes RI, 2007). Kesehatan kerja bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan usaha-usaha preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh factor pekerjaan, lingkungan kerja, serta penyakit umum.

Kebersihan dan kesehatan menjadi hal yang saling berkaitan. Kebersihan adalah cerminan bagi seseorang dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Seseorang yang menginginkan kondisi sehat harus mampu mengelola kebersihan diri maupun

lingkungannya dengan baik. Pada bidang pangan kebersihan menjadi hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas akhir suatu makanan. Kebersihan memang hal yang mudah tetapi jika tidak diterapkan akan berakibat fatal, keracunan makanan misalnya.

Sanitasi menjadi bagian penting dalam proses pengolahan pangan yang harus diterapkan dengan baik. Mengingat proses produksi makanan meliputi serangkaian kegiatan pada semua tahap produksi. Sanitasi ini berkaitan dengan 2 usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Labensky, dkk dalam Purnawijayanti (2001) mendefinisikan sanitasi sebagai penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan. Lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terkontaminasinya suatu

makanan. Oleh karenanya menciptakan lingkungan aman dan sehat akan berpengaruh terhadap kualitas makanan yang diolah, seperti mencuci bahan mentah dan peralatan masak yang akan digunakan, serta menempatkan makanan yang disajikan di tempat yang bersih dan tertutup sehingga terhindar dari debu ataupun alat yang dikenal sebagai pembawa bakteri penyebab penyakit.

Sementara itu hygiene (berasal dari nama dewi kesehatan Yunani, Hygieia) biasanya hanya diartikan sebagai “kebersihan”, tetapi dalam arti luas hygiene mencakup semua keadaan dan praktek, pola hidup, kondisi tempat dan lain sebagainya di sepanjang rantai produksi, yang diperlukan untuk menjamin keamanan pangan (Surono dkk, 2016: 89).

Penerapan Sanitasi dan hygiene merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pasal 5 Ayat 3 yang terdiri dari Bangunan Tempat Kerja, Fasilitas Kebersihan, Kebutuhan Udara, Tata Laksana Kerumahtanggaan.

PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang bergerak dalam industri pengolahan pangan, yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan pekerja (paparan bahan kimia, debu, panas, kelembaban, dan kebisingan). Fenomena yang muncul adalah perlunya penerapan standar K3 untuk mencegah gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Tuntutan Regulasi Pemerintah (Permenaker No. 5 Tahun 2018) dimana dalam peraturan ini mewajibkan perusahaan melakukan pengendalian faktor bahaya di lingkungan kerja, termasuk pengukuran, pemantauan, serta pengendalian kebisingan, pencahayaan, getaran, bahan kimia, hingga iklim kerja. Fenomena penelitian muncul dari bagaimana perusahaan mengimplementasikan kewajiban regulasi tersebut, terutama Pasal 5 ayat (3) yang mengatur tentang kewajiban pengendalian dan evaluasi. Meskipun regulasi sudah jelas, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengalami kendala penerapan K3 karena faktor biaya, keterbatasan SDM, kurangnya kesadaran pekerja, serta lemahnya pengawasan internal. Fenomena ini menarik diteliti untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang terhadap Permenaker tersebut. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3, meskipun perusahaan sudah memiliki prosedur. Misalnya, masih ada pekerja yang tidak

menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan, implementasi, dan perilaku pekerja.

Selain melihat penerapannya dalam pembelajaran produksi, penerapan sanitasi hygiene juga dijadikan dasar suatu penilaian. Menurut Tardif dalam Syah (2016:139) proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang telah dicapai peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian pembelajaran produksi makanan di sekolah terdiri dari nilai persiapan yang meliputi, tertib kerja, alat, bahan, pakaian kerja, dan sistematika kerja; nilai proses yang meliputi penanganan alat, K3, sikap kerja, berkemas, dan waktu; serta nilai hasil yang meliputi rasa, rupa, warna, tekstur, dan kreatifitas. Menilik hal-hal yang dinilai dalam pembelajaran produksi makanan di sekolah tersebut terlihat bahwa penerapan sanitasi hygiene menjadi indikator penilaian mulai dari persiapan hingga hasil. Dengan demikian, apabila peserta didik tidak menerapkan sanitasi hygiene dapat mempengaruhi prestasi peserta didik itu sendiri terutama dalam pembelajaran produksi makanan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3)?**

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3)

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang
Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3).
2. Bagi Penulis
Sebagai penambah wawasan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.
3. Bagi STIA
Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa STIA, guna menambah ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya proposal skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang dimana mendatang.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Menurut para ahli, Syukur (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan
2. Kelompok sasaran, yaitu keolompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan
3. Menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-undang. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas untuk melakukan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa ahli studi kebijakan berikut.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan. Tindakan-tindakan ini kan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagai mana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab

(2008:65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan nya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminis trasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Model George C. Edward III

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.

Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya, siapa pelaksananya, besar dana sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program di ukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

Peneliti menggunakan konsep Implementasi Kebijakan melalui pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III (2006:149), dimana dalam teorama ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi di atas, yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat, sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud.

2. Kejelasan,

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

3. Konsistensi,

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah.

1. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan, Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staff, sumber daya dalam implementasi adalah staff. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya sebagian oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

2. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang penting yang perlu dicermati dalam variabel disposisi adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan pejabat-pejabat tinggi.
- b. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

3. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi.

- a. Melakukan Standar Operating Procedures (SOPs), SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan
- b. Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Menurut Teori Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan implementasi dalam Wibawa (2005:36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kepentingan kebijakan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukungan oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

c. Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2015:99-101) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resource).
- c. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor, ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

d. Model Kerangka Analisis Implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Menurut Mazmanian Dan Sabatier Dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)

- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Dari bagan tersebut, terlihat bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor atau variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan proses implementasi, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan pengaruh faktor luar kebijakan. Kesemuanya berpengaruh pada proses implementasi yang dimulai dengan dihasilkannya keluaran (output) kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan untuk selanjutnya dapat diputuskan untuk direvisi atau tidak.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*.

Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008: 7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Penerapan Higiene dan Sanitasi

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Pasal 5 Ayat 3 terdiri dari

1. Bangunan Tempat Kerja

Adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja

untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

2. Fasilitas Kebersihan

Pembersihan fasilitas mencakup segala hal mulai dari pembersihan tempat secara berkala hingga pemeliharaan properti, pengelolaan.

3. Kebutuhan Udara

Kebutuhan Oksigenasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme tubuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan berbagai aktivitas sel tubuh dalam kehidupan sehari-hari

4. Tata Laksana Kerumahtangaan

Tata laksana rumah tangga merupakan proses yang merujuk tentang pengelolaan yang memberikan petunjuk tentang cara-cara pengendalian dan penuntasan pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang didasarkan pada fungsi dan hak serta kewajiban setiap individu selaku anggota keluarga.

Hygiene dan Sanitasi

Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi (Permenkes RI, 2011).

Hygiene sanitasi makanan adalah kebersihan individu terutama penjamah makanan yang bekerja langsung dalam pengolahan pangan karena penjamah makanan dapat mencemari bahan pangan (Anwar, Navianti, & Rusilah, 2020). Makanan harus diperhatikan hygiene sanitasinya karena apabila tidak diperhatikan dalam pengolahan, penyimpanan, maupun penyajiannya, maka dapat menjadi media penularan penyakit (Sari & Suyasa, 2021).

Pengertian Hygiene

Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu subyeknya. Misalnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan (Marsanti & Retno, 2018) Dalam praktiknya, menurut (Anam, Setioka, & Aprilia, 2021) penerapan hygiene di area dapur dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) mempehatikan kebersihan badan dengan mengenakan pakaian/seragam yang bersih; 2) tidak mengenakan aksesoris yang berlebihan seperti jam tangan,

kalung, gelang, atau benda lain yang mudah putus ataupun hilang; 3) mengenakan pakaian/seragam dengan ukuran yang pas (tidak terlalu besar/tidak terlalu kecil) serta pastikan bahwa kancing bajunya tidak mudah putus/copot sehingga tidak rawan terjatuh dan tercampur dengan bahan makanan yang sedang diolah; 4) mengenakan penutup kepala/rambut untuk menghindari kemungkinan jatuhnya rambut maupun ketombe ke alat dan makanan yang sedang diolah ; 5) selain itu, kebersihan kuku tangan dan kaki harus tetap dijaga agar selalu pendek, rapi, dan bersih.

Pengertian Sanitasi

Sanitasi berasal dari bahasa Latin, artinya sehat. Dalam ilmu terapan diartikan penciptaan dan pemeliharaan kondisi-kondisi higienis dan sehat. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Sanitasi sebagai bagian penting yang berkaitan dengan pengolahan makanan yang sesuai dengan persyaratan yang ada (Yulianto, Hadi, & Nurcahyo, 2020)

Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen.

Kerangka Berfikir

Menurut Ady Saputra (2008: 12) kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori. Kerangka pikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian” (Arikunto, 2010:3).

Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu

dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun dan Efendi, 2011).

Agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi adalah suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah namun pelaksanaannya harus adanya syarat anatar lain adanya orang atu pelaksan, uang dan kemampuan organisasi.
2. Penerapan Penerapan sanitasi hygiene dilakukan antara lain dengan menjaga air minum bersih, upaya mencuci tangan sebagai

kebiasaann sehat, menjaga lingkungan sumber air tetap bersih, menjaga toilet tetap bersih, menjaga makanan tetap aman dan menjaga lingkungan yang bersih.

Definisi Operasional

Defenisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut (Singarimbundan Effendi 2011:146). Variabel yang peneliti gunakan sesuai dengan model implentasikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan.

Analisis terhadap kebijakan tersebut, akan mengadopsi model implementasi kebijakan dari Edward III, yang meliputi beberapa indikator yaitu:

Tabel Definisi Oprasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (Model Implementasi George C. Edwards III dalam Widodo 2010:88)	Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi
2.	Penerapan Higiene dan Sanitasi Sumber Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 3	1. Bangunan Tempat Kerja 2. Fasilitas Kebersihan 3. Kebutuhan Udara 4. Tata Laksana Kerumahtangaan

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah orang
1	Area Manajer	1 orang
2	Area Sales Manajer	1 orang
3	Admin	1 orang
4	Kepala Gudang	1 orang
5	Staf Gudang	1 orang
	Jumlah	5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pertama, Data Primer yaitu data yang di peroleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi dari melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan.

Teknik penelitian merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebernarnya) dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi, melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku bermakna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang dilakukan peneliti ini adalah observasi partisipasif pasif yang berarti bahwa peneliti datang ketempat subjek melakukan kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua

pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancari (yang memberikan jawaban atas pertanyaan)..

3. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Dokumentasi

Adalah sebuah teknik untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan sumber-sumber yang bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara.

Teknik Analisa Data

Menurut Sugiono (2017:129) data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang membahas dengan jalan memaparkan, menafsirkan dan menulis sesuatu keadaan atau peristiwa, kemudian dianalisa serta disimpulkan dalam suatu kesimpulan umum yang dibahas, atau suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta atau keadaan yang terdapat pada PT Sasa Inti Tbk. Cabang Palembang.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan menurut Matthew dan Micheel (2009:96), yaitu:

1. Reduksi (pengumpulan data)

Yaitu data yang telah diperoleh dilapangan dalam bentuk uraian dan laporan yang terinci sambil dianalisis..

2. Penyajian data

Setiap data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori, kemudian melakukan penafsiran dan memberi interpretasi

3. Kesimpulan dan verifikasi

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, serta proposisi, temuan menarik pokok pikiran dan memberi solusi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3)

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengumpulan data peneliti memilih informan yang berkompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3)

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan George C Edward III

Dalam hasil penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan George C Edward III untuk Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3). Menurut George Edward III pendekatan implementasi ini dapat dilihat pada empat indikator yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi

konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Gambar Pertemuan Antara Area Manajer dengan Area Sales Manajer dan FSS Sosialisasi Kebijakan Permenaker No. 15 Tahun 2018



Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai komunikasi di mana dalam komunikasi tersebut terdapat unsur transmisi dan kejelasan informasi maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PT Sasa Inti, Tbk. Cabang Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa penyampaian informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) disampaikan melalui komunikasi formal seperti melalui papan informasi, rapat/pertemuan, surat edaran pelatihan dan edukasi tentang K3, komunikasi informal seperti diskusi langsung, media sosial perusahaan, poster dan spanduk.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diterapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai sumber daya yang

dimiliki oleh PT Sasa Inti, Tbk. Cabang Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui perusahaan memiliki sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang kompeten dan terlatih dalam bidangnya masing-masing. Sumber daya sarana dan prasarana yaitu berupa alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pekerja.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari sikap tersebut.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai disposisi atau sikap pelaksana oleh PT Sasa Inti, Tbk. Cabang Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui dimana perusahaan sebagai pelaksana kebijakan dari peraturan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui perusahaan memiliki struktur yang baik dan dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan tingkatan level organisasi perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penerapan Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 3

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 3 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan di tempat kerja dengan mewajibkan pengusaha untuk melakukan pengendalian faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 4 (empat) indikator dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) mengenai penerapan higiene dan sanitasi yaitu :

1. Bangunan Tempat Kerja

Bangunan tempat kerja dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Bangunan tempat kerja yang aman dan sehat dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Gambar Bangunan Tempat Kerja



Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai bangunan tempat kerja dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) sudah tertata dengan baik sesuai dengan desain dan konstruksi bangunan tempat kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, pemeliharaan dan perawatan bangunan tempat kerja yang memadai untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja serta fasilitas dan peralatan di bangunan tempat kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

2. Fasilitas Kebersihan

Fasilitas kebersihan adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja tetap bersih, sehat, dan layak bagi pekerja. Fasilitas ini mendukung kesehatan pekerja, mencegah penyakit akibat lingkungan kerja, dan menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

Gambar Fasilitas Kebersihan



Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai fasilitas kebersihan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) secara umum telah tersedia dan dikelola dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Permenaker No. 5 Tahun 2018..

3. Kebutuhan Udara

Dalam konteks K3 kebutuhan udara yang dimaksud adalah udara bersih dan layak hirup yang tersedia secara cukup di lingkungan kerja, baik untuk mendukung metabolisme pekerja maupun untuk menjaga kesehatan pernapasan serta mencegah paparan zat berbahaya.

Gambar Kebutuhan Udara Lingkup Pergudangan



Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai kebutuhan udara dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) telah menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan udara bersih di lingkungan kerja, baik melalui ventilasi alami maupun mekanis, serta upaya pengendalian suhu dan debu.

4. Tata Laksana Kerumahtanggaan

Tata laksana kerumahtanggaan dalam konteks K3 mengacu pada: pengelolaan dan pengaturan kebersihan, ketertiban, dan pemeliharaan fasilitas kerja secara rutin dan sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai tata laksana kerumahtanggaan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3) telah menerapkan tata laksana kerumahtanggaan secara cukup baik di berbagai unit kerja. Upaya ini meliputi penyediaan SOP kebersihan dan jadwal pembersihan rutin, kedisiplinan pekerja dalam menjaga kerapian dan kebersihan area kerja masing-masing, penerapan sistem piket, logbook, dan pelaporan kerusakan fasilitas, pembersihan fasilitas umum (toilet, pantry, ruang makan) secara berkala oleh tenaga kebersihan khusus., penataan barang di gudang yang terorganisasi dan mendukung keselamatan kerja.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan para

informan penelitian atau narasumber di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang, sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan George Edward III untuk mengukur Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang. (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3), yang terdiri dari empat indikator meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Sedangkan untuk Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang. (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3), terdiri dari empat indikator meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, tata laksana kerumahtanggaan. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Pada PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 5 Ayat 3)

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan George C Edward III

Berikut ini pembahasan dari indikator implementasi Kebijakan George Edward III yang meliputi, komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 5 Ayat 3 tentang penyediaan fasilitas K3 lingkungan kerja, menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, indikator sumber daya dalam implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 3 di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara umum terdapat alokasi anggaran, SDM, dan sarana pendukung, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan jumlah dan pelatihan tenaga kerja yang menangani

K3, sarana ventilasi dan sirkulasi udara yang belum seragam di seluruh area kerja, kegiatan pemeliharaan fasilitas yang kurang rutin akibat tekanan operasional harian, prioritas anggaran belum sepenuhnya mengarah pada pemenuhan aspek lingkungan kerja.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, indikator disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Pasal 5 Ayat 3 Permenaker No. 5 Tahun 2018 di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang masih perlu diperkuat. Meskipun komitmen dari manajemen sudah cukup baik, namun pemahaman teknis regulasi belum merata di semua pelaksana lapangan, sikap pelaksanaan masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama, bukan dari kesadaran pribadi akan pentingnya K3, peran supervisi dan pelatihan masih perlu ditingkatkan, agar sikap pelaksana tidak hanya menjalankan aturan secara mekanis, tetapi juga dengan kesadaran dan tanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, indikator struktur birokrasi dalam implementasi Pasal 5 Ayat 3 Permenaker No. 5 Tahun 2018 di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang sudah tersedia secara formal, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan teknis dan koordinatif. SOP K3 sudah disusun namun belum terimplementasi merata pada semua level pelaksana, pembagian tugas dan tanggung jawab sudah ada, tetapi pelibatan semua unit dalam pengawasan dan pelaksanaan belum optimal. Struktur birokrasi terkesan vertikal dan prosedural, namun belum mendorong budaya kerja yang responsif dan kolaboratif terhadap isu kesehatan kerja lingkungan.

Penerapan Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 3

Berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat 4 indikator yang mempengaruhi penerapan peraturan menteri tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Bangunan Tempat Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum bangunan tempat kerja PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang telah memenuhi standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3 Permenaker No. 5 Tahun 2018. Kondisi fisik bangunan tempat kerja telah dirancang secara permanen dan kokoh. Ketinggian, pencahayaan, dan sirkulasi udara bangunan sebagian besar telah memenuhi syarat kenyamanan kerja, terutama di

area produksi dan gudang. Sarana pendukung terdapat jalan akses yang cukup luas, pintu darurat, dan jalur evakuasi, namun tidak semua area memasang petunjuk arah evakuasi secara lengkap.

2. Fasilitas Kebersihan

Berdasarkan hasil penelitian fasilitas kebersihan di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang telah berlangsung cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Komitmen manajemen terlihat, tetapi masih terdapat hambatan yaitu pada kedisiplinan penggunaan dan perawatan oleh pekerja, pengalokasian sumber daya secara berkelanjutan dan monitoring birokratis terhadap pelaksanaan kebersihan harian.

3. Kebutuhan Udara

Berdasarkan hasil penelitian kebutuhan udara di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang sudah berjalan sebagian, terutama di area kerja utama seperti kantor. Namun, implementasi di area pendukung seperti gudang dan area logistik masih belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya alokasi ventilasi alami dan buatan di area gudang, kurangnya pengukuran dan evaluasi kualitas udara secara sistematis, koordinasi antar bagian terkait pengelolaan lingkungan kerja yang belum optimal.

4. Tata Laksana Kerumahtangaan

Berdasarkan hasil penelitian tata laksana kerumahtangaan di PT. Sasa Inti Tbk Cabang Palembang sudah dilakukan secara dasar, terutama di area kantor dan manajerial. Namun, masih terdapat kekurangan pada pengawasan, konsistensi pelaksanaan, dan manajemen fasilitas di area operasional seperti gudang. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya evaluasi berkala terhadap kebersihan dan kerapian ruang kerja. Perbedaan kualitas tata laksana antara area kantor (rapi dan terjaga) dan area gudang (kurang optimal). Tanggung jawab kebersihan antar divisi yang belum terstruktur dengan jelas.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 5 Ayat (3) telah terlaksana namun belum sepenuhnya optimal. Dari indikator implementasi komunikasi sudah dilakukan penyampaian informasi dan regulasi kebijakan

namun penyebaran informasi belum merata terutama untuk pegawai di lapangan. Sumber daya kurang maksimal adalah sumber daya sarana dan prasarana dimana kualitas alat pendukung masih kurang memadai dan perlu pemeliharaan. Sikap pelaksana/disposisi sebagian besar karyawan menunjukkan sikap mendukung terhadap pelaksanaan K3 tetapi tidak semua memahami urgensinya secara mendalam, sehingga pelaksanaan K3 kadang terabaikan. Struktur birokrasi sudah mengatur peran masing-masing, tetapi pengawasan lintas divisi belum berjalan efektif sehingga koordinasi terkait K3 masih lemah. Sedangkan dari indikator bangunan tempat kerja secara umum sudah memenuhi standar K3, namun masih perlu perbaikan pada jalur evakuasi dan ruang penyimpanan bahan kimia. Fasilitas kebersihan tersedia, namun kebersihan masih tergantung pada kedisiplinan masing-masing unit. Belum semua ruangan dijaga kebersihannya secara merata. Kebutuhan udara (ventilasi dan sirkulasi) di ruang administrasi cukup baik, tetapi beberapa area gudang terasa pengap. Sirkulasi udara belum sepenuhnya memenuhi syarat kenyamanan kerja. Tata laksana kerumahtanggaan sudah ada SOP dan struktur kerja kebersihan, namun pelaksanaannya masih inkonsisten karena lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya pembagian tanggung jawab antar unit.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kepada manajemen PT Sasa Inti, Tbk dalam implementasi K3, yaitu perlu dibentuk tim pengawas internal yang secara rutin melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap penerapan standar K3 lingkungan kerja, termasuk inspeksi mendadak. Gunakan media digital untuk penyampaian SOP terkait K3 agar sistem dapat berjalan dengan baik dan semua divisi dapat berkontribusi. Memberikan pelatihan dan sosialisasi rutin tentang pentingnya K3, agar

seluruh karyawan memahami tanggung jawabnya, tidak hanya menjalankan perintah tanpa kesadaran. Perlu adanya pemeliharaan fasilitas dan peralatan yang sudah tidak layak pakai untuk mendukung penerapan K3. Melakukan perbaikan ventilasi dan pencahayaan di area kerja tertutup agar lingkungan kerja lebih sehat dan produktif.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, dkk. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kountur, Ronny. 2008. *Manajemen Resiko Operasional Perusahaan*. Jakarta: Pendidikan Pembinaan Manajemen.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kamus.cektkp.com/gotong-royong/
Illumasaudara.com/2016/03/pengertian-gotong-royong-serta.html
- Milles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Poerwadarminta. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber Lain:**
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja